

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA SAGULING  
KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS**

*Implementation Of Village Regulation No. 9 Of 2024 On Waste Management In  
Saguling Village, Baregbeg Subdistrict, Ciamis Regency*

**Akmal Farizan<sup>1</sup>, Sirodjul Munir<sup>2</sup>, Regi Refian Garis<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Galuh, Indonesia

**Email : akmalcms20@gmail.com**

**Abstract**

*Waste management is essential for maintaining a clean and healthy environment. The village of Saguling has enacted Village Regulation No. 9 of 2024 on Waste Management. However, in its implementation, the Saguling Village Government has faced obstacles such as a lack of budget and land for the construction of a temporary waste disposal site, as well as low public awareness regarding waste management. This study aims to analyze the extent to which the implementation of Village Regulation No. 9 of 2024 on Waste Management in Saguling Village has been carried out. The research method used is qualitative descriptive, employing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation, followed by data analysis techniques including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results indicate that the implementation of Village Regulation No. 9 of 2024 on Waste Management in Saguling Village has not yet been optimal. This is evident from the numerous indicators that remain suboptimal and technically hinder the Village Government in implementing waste management policies in Saguling Village. Despite facing obstacles in its implementation, the Saguling Village Government continues to work toward the successful implementation of waste management through public appeals, outreach, and engagement with the community.*

**Keywords:** Policy Implementation, Village Regulations, Waste Management

**Abstrak**

*Pengelolaan sampah merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan guna menjaga tata kelola lingkungan yang bersih dan sehat. Desa Saguling mengesahkan produk hukum berupa Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sampah. Namun dalam implementasinya, Pemerintah Desa Saguling mengalami hambatan-hambatan seperti tidak adanya anggaran dan lahan untuk pembangunan tempat pembuangan sampah sementara, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana Implementasi Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Saguling dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, lalu teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Saguling belum berjalan secara optimal, hal tersebut terlihat dari masih banyaknya indikator yang belum optimal dan secara teknis menghambat Pemerintah Desa dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Desa Saguling. Meskipun menghadapi hambatan-hambatan dalam implementasinya,*

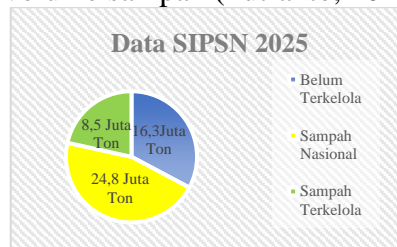
*Pemerintah Desa Saguling terus berupaya melalui himbauan, sosialisasi, dan pendekatan kepada masyarakat agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan.*

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Peraturan Desa, Pengelolaan Sampah

## PENDAHULUAN

Limbah padat yang bersumber dari aktivitas masyarakat maupun proses alamiah lingkungan dapat dikategorikan sebagai sampah (Sari, et al., 2025:564). Sampah di definisikan sebagai sisa material padat atau setengah padat, bersifat organik yang dapat terurai maupun anorganik yang sulit terurai, bersumber dari dinamika domestik manusia dan fenomena alam (Darmayanti, et al., 2023:133).

Menurut Cohen (2019), perubahan gaya hidup ke arah modernisasi telah mengubah konsumsi masyarakat menjadi berlebihan dan memicu permasalahan sampah rumah tangga. Pola konsumsi masyarakat dalam berbelanja yang sering kali memakai meningkatkan volume sampah (Putranto, 2023).



Sumber: (SIPSN,2025)

Diagram diatas mencatat bahwa Pengelolaan Sampah Nasional di Indonesia masih belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari masih banyaknya sampah yang belum terkelola dengan baik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan untuk membuka peluang bagi desa dalam mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat dengan bentuk Peraturan Desa (Harmaini, et al., 2026:26). Pemerintah desa memiliki hak untuk mengatur dan mengelola anggarannya sendiri secara mandiri (Nuriyanti, et al., 2024:280). Perdes masuk dalam bagian hierarki perundang-undangan dari peraturan daerah dan setara dengan peraturan bupati/walikota, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif yang bertanggung jawab atas pembentukannya (Arisjulyanto, 2025:118). Pemerintahan desa memiliki kedekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berimplikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan kekuasaan antar kekuatan politik di tingkat desa (Garis, R. R., 2017:109).

Dalam konteks empiris, Desa Saguling di Kecamatan Bareggeg merupakan desa yang progresif dengan menerbitkan Peraturan Desa No. 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah. Pengesahan Peraturan Desa tersebut di dasari oleh adanya keluhan dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah di lingkungan sekitar yang dinilai masih belum berjalan optimal. Pemerintah Desa serta Badan Permusyawaratan Desa memandang keluhan tersebut sebagai permasalahan yang perlu ditindak lanjuti melalui pembentukan Peraturan Desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Desa bersama BPD, dengan tujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat (Pamuji, et al., 2017:497).

Di Desa Saguling terdapat sebuah tempat untuk mengelola sampah rumah tangga yaitu Bank Sampah Tumras. Pengelolaan sampah merupakan bagian dari pengelolaan kebersihan, yang mengarah pada tinjauan estetika (Purwendah et al., 2022:124). Prinsip 3R dapat menjadi pedoman sederhana untuk membantu Ibu Rumah Tangga dalam mengurangi sampah di rumah melalui *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (Eprianti et al., 2021:180-181). Selain meningkatkan kesadaran, penting juga melakukan pemilahan sampah dengan benar agar dapat memisahkan sampah bermanfaat dan sampah tidak berharga (Kusumaningrum, et al., 2020:14).

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah dirumuskan (Garis, R. R., 2025).

Adanya Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk mengatasi suatu permasalahan di masyarakat yang mengeluhkan bahwa pengelolaan sampah di Desa Saguling belum dilakukan dengan baik meskipun terdapat Bank Sampah Tumras. Namun, dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah masih menghadapi hambatan seperti anggaran yang terbatas, sumber daya yang kurang memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama yang membuat peraturan desa ini belum berjalan secara optimal. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Desa Saguling.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Saguling dilaksanakan, mengidentifikasi hambatan dan upaya di lapangan serta mengungkap dan memahami mekanisme kebijakan tersebut agar dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup di Desa Saguling.

## **METODE**

Dalam Penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2022), “kualitatif deskriptif merupakan penelitian berlandaskan filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci”.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sumber data primer yang di dapatkan dengan melakukan wawancara dengan enam informan dan observasi, serta melalui sumber data sekunder yang di dapatkan melalui hasil dokumentasi. Pada penelitian ini terdapat sebanyak enam informan untuk menggali informasi tentang bagaimana Implementasi Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Saguling dilaksanakan, diantaranya yaitu Kepala Desa Saguling, Sekretaris Desa Saguling, Ketua BPD Desa Saguling, Ketua Bank Sampah Tumras, Sekretaris Bank Sampah Tumras, dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu, melakukan analisis data melalui model Miles dan Hubberman (dalam sugiyono, 2013: 246) yang menyatakan ada tahapan tiga teknik analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Implementasi Peraturan Desa No 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yang dilakukan dengan cara wawancara kepada enam informan dan observasi secara langsung dengan menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn (dalam Marwiyah, 2022:39-40) yang terdiri dari enam variabel untuk mendukung dan mengetahui lebih jelas bagaimana peraturan desa tersebut di implementasikan dengan optimal atau tidak optimal, maka analisis hasil wawancara dan pembahasan melalui enam variabel menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Marwiyah, 2022:39-40) dapat dipaparkan sebagai berikut:

### 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Keberhasilan suatu pelaksanaan implementasi kebijakan dapat diukur melalui kejelasan Standar dan Sasaran Kebijakan yang telah ditetapkan. Apabila Standar dan Sasaran Kebijakan dirumuskan dengan terlalu ideal atau terlalu idealis, maka akan sangat sulit diwujudkan oleh aktor pelaksana. Namun realita dilapangan menunjukkan hal yang berbeda, hal tersebut terlihat dari indikator-indikator seperti adanya turunan regulasi dalam bentuk Peraturan Kepala Desa mengenai pengelolaan sampah, adanya *standard operating procedure* (SOP) yang jelas mengenai pengelolaan sampah, dan adanya penetapan target persentase pengurangan sampah setiap tahunnya belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan ke enam informan mengungkap bahwa indikator-indikator diatas menghadapi hambatan-hambatan seperti terbatasnya anggaran, serta lahan untuk pembangunan tempat pembuangan sementara yang belum tersedia menjadi faktor-faktor terhambatnya implementasi. Namun Pemerintah Desa Saguling terus berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan menghimbau dan menyadarkan masyarakat melalui sosialisasi dengan Rt dan Rw.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa dimensi Standar dan Sasaran Kebijakan belum berjalan secara optimal, hal ini karena tidak sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa “Variabel ini harus jelas dan terukur agar implementasi bisa berjalan lancar, jika standar dan sasaran terlalu ideal atau ambigu maka akan sulit direalisasikan”. Hal tersebut dikarenakan kenyataan dilapangan yang menunjukkan adanya hambatan-hambatan yang secara signifikan menghambat proses implementasi.

### 2. Sumber Daya

Dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan perlu adanya kapasitas sumber daya yang mumpuni, hal tersebut mencakup Sumber Daya Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Finansial. Namun realita dilapangan menunjukkan hal yang berbeda, hal tersebut terlihat dari indikator-indikator seperti adanya sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pengelolaan sampah, adanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pengelolaan sampah dan adanya finansial yang mapan untuk mendukung pengimplementasian kebijakan tentang pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan ke enam informan mengungkap bahwa indikator-indikator diatas menghadapi hambatan-hambatan

seperti adanya anggaran yang tersedia dan rendahnya kesadaran masyarakat termasuk anak muda menjadi faktor-faktor terhambatnya implementasi. Namun Pemerintah Desa Saguling terus berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengadakan bimtek mengenai pengelolaan sampah.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa dimensi Sumber Daya belum berjalan secara optimal, hal ini karena tidak sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa “Ketersediaan dan kemampuan memanfaatkan sumber daya seperti finansial, waktu, dan terutama sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten untuk menjalankan kebijakan”. Hal tersebut dikarenakan kenyataan dilapangan yang menunjukkan adanya hambatan-hambatan yang secara signifikan menghambat proses implementasi.

### **3. Karakteristik Pelaksana**

Pola implementasi publik pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh karakteristik para pelaksana. Variabel ini mengacu pada struktur birokrasi, norma organisasi, serta model jejaring hubungan yang terbangun di dalam suatu birokrasi tersebut. Namun realita dilapangan menunjukkan hal yang berbeda, hal tersebut terlihat dari indikator-indikator seperti adanya kompetensi dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pengelolaan sampah dan adanya kapabilitas yang mumpuni dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik, tetapi terdapat satu indikator yang sudah berjalan baik yaitu adanya rasa tanggung jawab pada tugasnya dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan ke enam informan mengungkap bahwa terdapat dua indikator yang belum berjalan baik karena menghadapi hambatan-hambatan seperti tidak adanya anggaran dan lahan yang tersedia, serta Sumber Daya Manusianya yang masih rendah menjadi faktor-faktor terhambatnya implementasi. Namun Pemerintah Desa Saguling terus berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan terus melakukan rapat dengan Rt dan Rw, menyadarkan masyarakat dan mengupayakan sampah tersebut dapat menjadi pupuk organik.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa dimensi Karakteristik Pelaksana belum berjalan secara optimal meskipun terdapat satu indikator yang berjalan dengan baik, hal ini karena terdapat satu indikator yang tidak sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa “Karakteristik Pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Kemudian semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program”. Hal tersebut dikarenakan kenyataan dilapangan yang menunjukkan adanya hambatan-hambatan yang secara signifikan menghambat proses implementasi.

### **4. Disposisi Implementator**

Disposisi pelaksana menggambarkan suatu psikologis dan orientasi nilai para pelaksana yang memuat unsur integritas, komitmen organisasi, serta pemahaman mendalam terhadap kebijakan. Variabel perilaku ini ditentukan oleh tiga respon implementator yaitu respon implementator terhadap substansi kebijakan, intensitas disposisi implementator, dan preferensi nilai yang dimiliki oleh

implementator. Namun realita dilapangan menunjukkan hal yang berbeda, hal tersebut terlihat dari indikator seperti adanya komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik, tetapi terdapat dua indikator yang sudah berjalan dengan baik yaitu adanya dukungan penuh terhadap tujuan dari implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah dan adanya kesamaan persepsi dalam memahami kebijakan tentang pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan ke enam informan mengungkap bahwa terdapat satu indikator yang belum berjalan baik karena menghadapi hambatan-hambatan seperti tidak adanya anggaran, Sumber Daya Manusia yang masih rendah, serta pemahaman atau kemauan dari masyarakatnya yang belum tergerakkan dalam mengelola sampah dari rumah. Namun Pemerintah Desa Saguling terus berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan terus memberikan pendekatan yang lebih intens kepada masyarakat untuk mengadakan kebersihan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa dimensi Disposisi Implementator belum berjalan secara optimal meskipun terdapat dua indikator yang berjalan dengan baik, hal ini karena terdapat satu indikator yang tidak sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa “Variabel ini mencakup respon implementator tiga respon implementator yang penting, yaitu respon implementator terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementator, dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator”. Hal tersebut dikarenakan kenyataan dilapangan yang menunjukkan adanya hambatan-hambatan yang secara signifikan menghambat proses implementasi.

## **5. Hubungan Antar Organisasi**

Hubungan antar organisasi dalam struktur pemerintahan desa berfungsi sebagai instrumen penting untuk menyelaraskan persepsi melalui komunikasi kelembagaan yang baik. Dimensi ini menuntut adanya harmonisasi program kerja melalui mekanisme koordinasi serta kemitraan dengan instansi lain. Dalam kerangka teoritis, pola interaksi tersebut mewujudkan komunikasi koordinatif sekaligus kapasitas eksekusi aktivitas di tingkat lokal. Namun realita dilapangan menunjukkan hal yang berbeda, hal tersebut terlihat dari indikator seperti adanya koordinasi dengan instansi lain terkait penanganan sampah belum dan adanya hubungan kerja sama dengan instansi lain terkait pengelolaan sampah yang belum berjalan dengan baik, tetapi terdapat satu indikator yang sudah berjalan dengan baik yaitu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengelola sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan ke enam informan mengungkap bahwa terdapat dua indikator yang belum berjalan baik karena menghadapi hambatan-hambatan seperti anggaran yang tidak ada, masalah operasional pengangkutan sampah dari DPRKPLH, kendaraan yang tidak memadai dari dinas sehingga armada pengangkut sampah belum bisa sampai ke Desa Saguling dan kesiapan masyarakat serta Pemerintah Desa Saguling. Namun Pemerintah Desa Saguling terus berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan terus memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai lingkungan harus tetap bersih walaupun dengan anggaran yang terbatas.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa dimensi Hubungan Antar Organisasi belum berjalan secara optimal meskipun terdapat satu indikator yang berjalan dengan baik, hal ini karena terdapat dua indikator yang tidak sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa “Variabel ini perlu banyak program implementasi dalam sebuah program dukungan dan koordinasi dengan instansi lain”. Hal tersebut dikarenakan kenyataan dilapangan yang menunjukkan adanya hambatan-hambatan yang secara signifikan menghambat proses implementasi.

## **6. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi**

Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi merupakan kondisi eksternal yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik. Hambatan dalam tata kelola di lapangan sering kali bersumber dari tidak idealnya kondisi sosial, politik, dan ekonomi tersebut. Fenomena ini berpotensi terjadi meskipun perencanaan strategis yang dirancang sejak awal memiliki kualitas operasional yang sangat matang. Namun realita dilapangan menunjukkan hal yang berbeda, hal tersebut terlihat dari indikator seperti adanya upaya untuk menetapkan tarif restibusi sampah rumah tangga dengan adil berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat yang belum berjalan dengan baik, tetapi terdapat dua indikator yang sudah berjalan dengan baik yaitu adanya upaya melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dan adanya upaya untuk merangkul BPD dan Tokoh Masyarakat agar satu suara dalam mendukung kebijakan tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan ke enam informan mengungkap bahwa terdapat satu indikator yang belum berjalan baik karena menghadapi hambatan-hambatan seperti masih banyak nya masyarakat yang menolak untuk membayar tarif retribusi pengangkutan sampah rumah tangga. Namun Pemerintah Desa Saguling terus berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan terus melakukan koordinasi dengan Rt dan Rw lalu dikomunikasikan dengan DPRKPLH, melakukan pendekatan kepada masyarakat supaya bersedia dalam membayar retribusi pengangkutan sampah rumah tangga di Desa Saguling, dan mengklasifikasikan masyarakat mampu, tidak mampu, dan miskin.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa dimensi Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi belum berjalan secara optimal meskipun terdapat dua indikator yang berjalan dengan baik, hal ini karena terdapat satu indikator yang tidak sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa “Kondisi ekonomi, sosial, dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan”. Hal tersebut dikarenakan kenyataan dilapangan yang menunjukkan adanya hambatan-hambatan yang secara signifikan menghambat proses implementasi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat penulis simpulkan bahwa Implementasi Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis secara umum belum berjalan dengan optimal, hal tersebut terbukti dari enam

dimensi seperti Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Pelaksana, Disposisi Implementator, Hubungan Antar Organisasi, dan Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi yang diteliti secara keseluruhan belum berjalan dengan optimal.

Adapun hambatan-hambatan dalam Dimensi Standar dan Sasaran Kebijakan adalah anggaran yang terbatas, lahan pembangunan tempat pembuangan sampah yang belum tersedia, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Hambatan dalam Dimensi Sumber Daya adalah anggaran terbatas dan rendahnya kesadaran masyarakat. Hambatan dalam Dimensi Karakteristik Pelaksana adalah anggaran yang terbatas, lahan tidak tersedia, dan SDM nya yang masih rendah. Hambatan dalam Dimensi Disposisi Implementator adalah tidak adanya anggaran, SDM atau kemauan dari masyarakatnya yang belum tergerakkan dalam mengelola sampah. Hambatan dalam Dimensi Hubungan Antar Organisasi adalah anggaran yang tidak tersedia, masalah operasional pengangkutan sampah dari DPRPKLH, dan kesiapan dari Pemerintah Desa Saguling itu sendiri. Terakhir, hambatan dalam Dimensi Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi adalah adanya hambatan-hambatan seperti masih banyaknya masyarakat yang menolak untuk membayar retribusi sampah.

Adapun upaya-upaya dalam Dimensi Standar dan Sasaran Kebijakan adalah dengan menghimbau dan menyadarkan masyarakat melalui sosialisasi dengan Rt dan Rw. Upaya dalam Dimensi Sumber Daya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengadakan bimtek mengenai pengelolaan sampah. Upaya dalam Dimensi Karakteristik Pelaksana adalah dengan terus melakukan rapat dengan Rt dan Rw, menyadarkan masyarakat dan mengupayakan sampah tersebut dapat menjadi pupuk organik. Upaya dalam Dimensi Disposisi Implementator adalah dengan terus memberikan pendekatan kepada masyarakat untuk mengadakan kebersihan lingkungan. Upaya dalam Dimensi Hubungan Antar Organisasi adalah dengan terus memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai lingkungan harus tetap bersih walaupun dengan anggaran yang terbatas. Terakhir, upaya dalam Dimensi Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi adalah dengan terus melakukan koordinasi dan pendekatan kepada masyarakat supaya bersedia dalam membayar retribusi sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arisjulyanto, D. (2025). The Position and Legal Authority of Village Regulations within the Hierarchy of National Legislation. *Journal of Social And Education Research*, 3(3), 118-127.
- Darmayanti, L., Dharma, Y. N., Lestari, N. Y., Sitio, E., Aulia, R. D., & Ridwansyah, M. (2023). Waste Management Strategy Based On Community Empowerment Through Waste Bank In Bandarraya Village. *KAIBON ABHINAYA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5(2), 132-137.
- Eprianti, N., Himayasari, N. D., Mujahid, I., & Srisusilawati, P. (2021). Analisis implementasi 3R pada pengelolaan sampah. *Jurnal Ecoment Global*, 6(2), 179-184.
- Garis, R. R. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN DESA. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(4), 1561-1571.



- Garis, R. R. (2026). PERAN AKTOR UTAMA DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI TINGKAT LOKAL: TINJAUAN LITERATUR TENTANG RELASI PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN ELITE LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESA. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 13(1), 274-282.
- Garis, Regi Refian. "Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Di Kabupaten Ciamis (Studi kasus pada lima desa di Kabupaten Ciamis)." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3.2 (2017): 108-130.
- Harmaini, H., Dahri, M., Chandra, F., Wulansari, D. P., & Wati, I. K. R. (2026). Strengthening Village Regulations (Perdes) Based on Local Wisdom in The Management and Protection of Forests in Tanjung Mudo Village. *Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25-34.
- Herlinawati, H., Marwa, M., & Zaputra, R. (2022). Sosialisasi Penerapan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Sebagai Usaha Peduli Lingkungan . *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 209-215.
- Kusumaningrum, L., Dewi, I. R., Ulya, F. D., Sitepu, J. A. P., Izdihar, R. S., & Pramitasari, T. A. (2020). Comparison of waste management between Indonesia and South Korea. *Journal of Global Environmental Dynamics*, 1(1), 13-19.
- Marwiyah, S. (2022). *Buku Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Nuriyanti, Wulan, Sirodjul Munir, dan Lina Marlioni. "Pengawasan Tata Kelola Destinasi Wisata Bukit Meralaya Oleh Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis." *Inskripsi 1.2* (2024): 279-286.
- Pamuji, K., Nasihuddin, A. A., & Riswari, R. A. (2017). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Jurnal Idea Hukum*, 3(1), 493-506.
- Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.
- Purwendah, E. K. (2022). Kewajiban masyarakat dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 70-77.
- Putranto, P. (2023). Prinsip 3R: Solusi Efektif untuk Mengelola Sampah Rumah Tangga. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8591-8605.
- Sari, L., Bimasri, J., & Safriyani, E. (2025). Impact Of Management System On Household Waste Utilization Potential. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 5(02), 564-572.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Cetakan ke-19). Bandung: ALFABETA, CV.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.